

BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu LAKIP instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu LAKIP juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan.

Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana urusan komunikasi dan informatika, mempertanggung-jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan sesuai Rencana Strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diharapkan secara umum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi dan secara internal dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara baik dan akuntabel. efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan.

A. STRUKTUR ORGANISASI

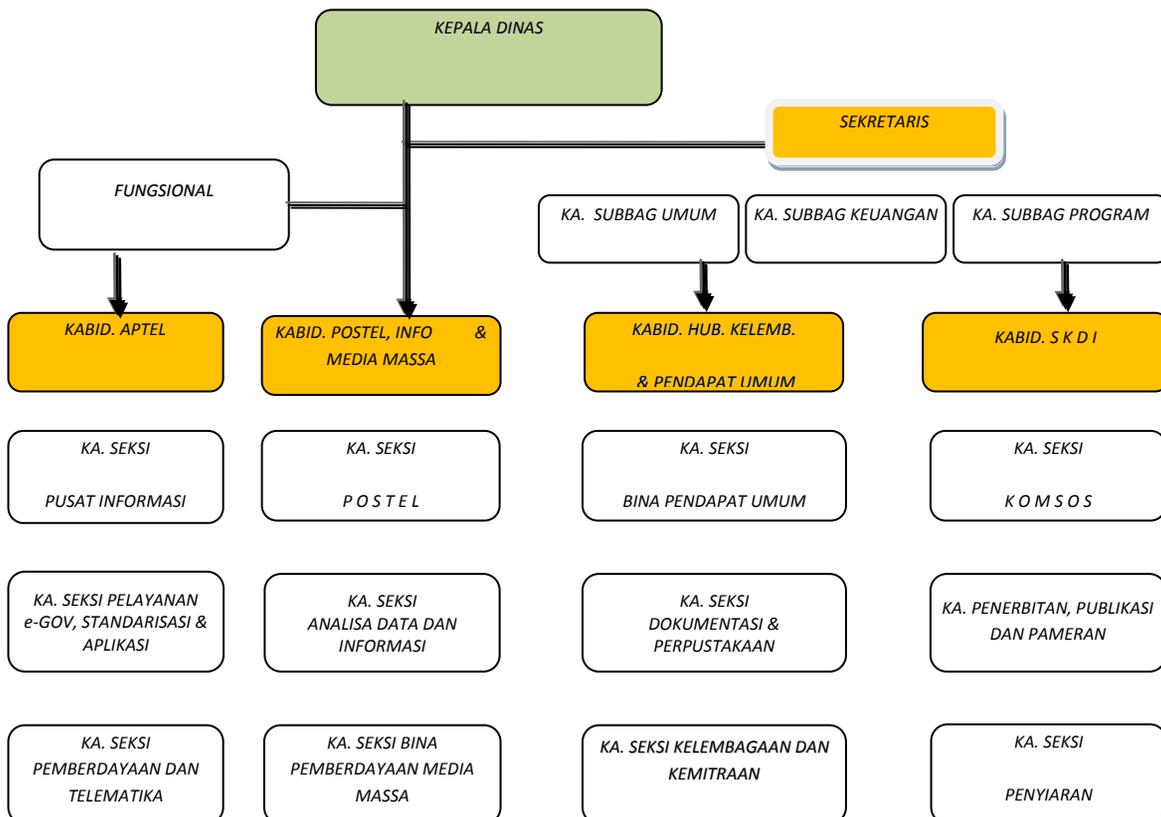
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas di Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan Provinsi. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Aplikasi Telematika
4. Bidang Pos Telekomunikasi, Informasi dan Media Massa
5. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Pendapat Umum
6. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan Struktur Organisasi berikut :

Bagan 1

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Utara secara baik dan akuntabel, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sangat mendukung sebagai instrumental vital. Saat ini, Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2012 memiliki 169 pegawai dengan kualifikasi dan kompetensi beragam di antaranya, Pejabat Struktural 18 orang, Pejabat Fungsional 13 orang dan Tenaga administratif/Staf 138 orang.

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan yaitu : Doktoral (S3) 1 orang, Master (S2) 10 orang, Sarjana (S1) 72 orang, Diploma Tiga (D3) 11 orang, SLTA 65, SLTP 6 orang dan SD 4 orang. Sedangkan menurut Fungsi/Jabatan yang diemban, Dinas Kominfo Provsu memiliki 19 orang pejabat struktural (Kepala Dinas 1 orang, Sekretaris 1 orang, Kepala Bidang 5 orang dan Kasubbag/Kasubbid 13 orang) dan pejabat Fungsional 13 orang.

B. FUNGSI DAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Dinas di Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo Provsu) adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan/kewenangan Provinsi, di bidang kebijakan teknis aplikasi telematika pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi diseminasi informasi dan pos dan telekomunikasi, serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi desiminasi informasi, pos, dan telekomunikasi, data informasi dan pembinaan media massa.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aplikasi telematika, pendapat umum, hubungan kelembagaan, sarana komunikasi, desiminasi, informasi, pos, telekomunikasi, data informasi dan pembinaan media massa.
3. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang komunikasi, informasi dan telematika.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi, informasi dan telematika.

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

C. POTENSI DAERAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Penyatuatapan Subdis Pos dan Telekomunikasi Dinas Perhubungan, Kantor PDE dan Badan Informasi dan Komunikasi Provinsi Sumatera Utara menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Dengan penyatuatapan institusi yang menangani komunikasi dan informatika tersebut, maka diharapkan penggalian potensi daerah dapat lebih dioptimalkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kekuatan mitra kerja eksternal yang berada di Sumatera Utara.

D. SISTEMATIKA LAKIP

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan Sistematika LAKIP sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**
Berisi uraian mengenai gambaran umum organisasi dan sekilas pengantar lainnya.
- **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**
Berisi ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja).
- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**
Dalam Bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian hasil pengukuran kinerja.
- **BAB IV PENUTUP**
- **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI

Visi Pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Harmoni Keberagaman”.

Pernyataan visi di atas dilandasi dengan pemahaman bahwa pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan :

1). Masyarakat Informasi yang Maju

Artinya:

1. Masyarakat mampu memilih, memilah dan memanfaatkan informasi guna meningkatkan perubahan sosial dan pembangunan ekonomi.
2. Masyarakat yang memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap informasi.
3. Memiliki akses Informasi sampai ke rumah-rumah penduduk dan membuka akses informasi kepulau-pulau terdepan.

2). Maju dan Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman

Artinya : Masyarakat Sumatera Utara yang terdiri dari berbagai etnis dan agama, hidup secara demokratis, menjunjung tinggi HAM dan dengan informasi mampu meningkatkan taraf hidup secara layak dan bermartabat serta mampu mendorong tercapainya sasaran masyarakat tidak bodoh dan punya masa depan.

B. MISI

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan komunikasi dan informatika sesuai RPJMD (2009 – 2013) adalah:

1. Meningkatkan fasilitasi dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme.

2. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum.
3. Meningkatkan pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika.
4. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern.
5. Meningkatkan kualitas jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah.

C. MOTTO

Mendorong percepatan pencapaian Visi dan Misi, maka dirumuskan Motto Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

KOMUNIKASI LANCAR – INFORMASI CEPAT DAN BENAR

D. TUJUAN

Tujuan yang ditetapkan berdasarkan Visi dan Misi terkait bidang komunikasi dan informatika sesuai RPJMD (2009 – 2013) adalah :

1. Tersedianya fasilitasi dan kapasitas administrasi, program dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan literasi dan profesionalisme, agar rakyat memiliki tempat bertanya.
2. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika Pemerintah dan masyarakat, lembaga media massa, dokumentasi dan monitoring pendapat umum, agar rakyat memiliki tempat menyampaikan pendapat.
3. Terwujudnya pelayanan informasi multimedia kepada publik, yang terprogram, akuntabel dan didukung pemberdayaan telematika, agar rakyat tidak buta informasi.
4. Meningkatkan kualitas pemerataan akses informasi dan pemanfaatan jaringan media informasi dan komunikasi tradisional, cetak dan modern, agar rakyat tidak bertanya sendiri dan menjawab sendiri.
5. Meningkatnya kualitas jaringan pos dan telekomunikasi yang mudah dan murah, agar rakyat berbudaya informasi.

E. SASARAN

Sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Pengembangan bidang komunikasi dan informatika selama lima tahun (2009 – 2013) sebagaimana tertuang dalam Renstra dengan sasaran utamanya adalah Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Maju Dan Sejahtera dalam Harmoni Keberagaman, maka implementasi pencapaiannya adalah :

1. Terbukanya jaringan Informasi dan Forum Komunikasi Media Tradisional di 33 Kabupten/Kota se Sumatera Utara.
2. Terwujudnya kerjasama dengan Asosisasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk membuka Blank Spot penyebaran Surat Kabar Lokal diwilayah non komersil.
3. Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel).

F. STRATEGI

Dalam rangka pencapaian Visi “Terwujudnya Masyarakat Informasi Yang Maju Dan Sejahtera Dalam Harmoni Keberagaman”, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Maksimalkan kekuatan dan semangat PNS untuk mengatasi tuntutan masyarakat ata pelayanan SDM Kominfo untuk ketersediaan informasi yang akurat, cepat mudah, dan merata
2. Maksimalkan kekuatan sistem organisasi dan institusi ex-officio untuk memberikan pemahaman yang sama antara Pemprov, Pemkab/pemko, legislatif dan masyarakat akan implementasi PP 38/2007.
3. Maksimalkan kemampuan Dinas Kominfo beradaptasi untuk menghadapi globalisasi informasi yang diakibatkan letak geografis Sumatera Utara
4. Maksimalkan pemanfaatan infrastruktur dasar untuk mengatasi blank spot komunikasi dan informatika.

G. RENCANA KINERJA

Agar program dan kegiatan pokok itu tepat sasaran dan berdaya guna bagi pemerintah dan masyarakat Sumatera Utara, maka masing-masing program/kegiatan strategis itu tentu memerlukan perencanaan (*planning*) yang sistematis, terukur, dapat

dicapai dan berdayaguna untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan pengelolaan yang benar, jujur, akuntabel dan berbasis masyarakat. Untuk itulah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara membuat rencana kinerja tahun 2012 berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Tabel 1
Rencana Kinerja tahun 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terbukanya jaringan informasi dan forum komunikasi media tradisional di 33 kab/kota se-Sumatera Utara	a. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah terakses informasi	4 kali, 4 di kab/kota
		b. Jumlah Kab/Kota di Provsu yang masih dalam kategori blank spot informasi	1 kali, 33 kab/kota
		c. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara - Jumlah ketersediaan dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara	1 kali
		d. Frekuensi lomba, pementasan, pagelaran, pameran dan diseminasi informasi di kab/kota	5 kali
		e. Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi	36 kali
		f. Frekuensi pelaksanaan Harmnoni Iman di TVRI	144 kali
2	Terwujudnya kerjasama dengan Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk membuka Blank Spot penyebaran Surat Kabar Lokal diwilayah non komersil	a. Jumlah kerjasama yang terbentuk dengan kelembagaan Kominfo; Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar Lokal : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dalam penyebaran informasi.	1 kali, 80 peserta
		b. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan Infokom/Humas Pemprovsu	19 kali
		c. Frekuensi Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprovsu.	1 kali
		d. Jumlah Eksaminasi Informasi dan Diseminasi Informasi melalui media.	12 kali
3	Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel)	a. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan mitra kerja Postel (asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya)	25 kali
		b. Jumlah Kab/Kota yang sudah terlayani Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)	33 kab/kota

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan program dan kegiatan.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Kegiatannya:

- a. Sosialisasi tentang Pemberdayaan KIM di Kab/kota
- b. Pekan Raya Sumatera Utara
- c. Lomba Kelompok Informasi se Sumatera Utara
- d. Pameran Filateli
- e. Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional
- f. Lomba Pementasan Tradisional di Kab/kota
- g. Dialog Interaktif di Televisi
- h. Dialog Interaktif di Radio
- i. Tabolid Sumut Membangun
- j. Harmoni Iman Islam di TVRI
- k. Harmoni Iman Kristen, Protestan /Katolik di TVRI
- l. Harmoni Iman Budha/Hindu di TVRI
- m. Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Kota

2. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOMINFO DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Kegiatannya :

- a. Workshoop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan
- b. Peningkatan *Capacity Building* untuk peningkatan Juru Foto dan Juru Kamera di lingkungan Humas dalam rangka penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. Pertemuan Infokom / Humas Pemprov
- d. Jumpa Pers
- e. Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov
- f. Temu Konsultasi Bakohumas
- g. Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi melalui Media Informasi

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

Kegiatannya :

- a. Rapat Evaluasi Rutin Pos dan Telekomunikasi
- b. Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Media Massa Postel, Asosiasi, Provider dan Organisasi Radio Lainnya
- c. Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota
- d. Operasional M-PLIK ke 33 kab/Kota

H. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja tahun 2012 merupakan perjanjian kinerja Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan Sumber Daya yang dimiliki. Penetapan Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya dan menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis.

Tabel 2
Penetapan kinerja Tahun 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran
1	Terbukanya jaringan informasi dan forum komunikasi media tradisional di 33 kab/kota se-Sumatera Utara	a. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah terakses informasi	4 kali, 4 kab/kota 4 kali, 4 kab/kota	Program Hubungan Kelembagaan dan antar lembaga Kegiatan: 1. Desiminasi Informasi dan Forum dialog dengan kab/ko	Rp.100.320.000,-
		b. Jumlah Kab/Kota di Provsu yang masih dalam kategori blank spot informasi	33kab/kota 1 kali, 33 kab/kota	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: 1.Sosialisasi tentang Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kab/Kota	Rp. 45.671.000,-
		c. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara - Jumlah ketersediaan dan prasarana (media) informasi di	1 kali	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	

		kab/kota se-Sumatera Utara	1 kali	Kegiatan: 1. Pekan Raya Sumatera Utara	Rp.67.935.000,-
		Frekuensi lomba, pementasan, pagelaran, pameran dan diseminasi informasi di kab/kota	5 kali, 55 kab/kota 1 kali, 33 kab/kota 1 kali, 25 kab/kota 2 kali	A. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: 1. Lomba Kelompok Informasi se Sumatera Utara. 2. Lomba Pementasan Tradisional di Kab/Kota 3. Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di kab/kota	Rp.65.725.000,- Rp.102.185.000,- Rp. 225.470.000,-
			1 kali	B. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi Kegiatan: Pameran Filateli	Rp. 168.284.800
		d. Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi	36 kali 18 kali 18 kali	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: 1.Dialog interaktif di radio 2.Dialog interaktif di televisi	Rp. 80.526.000,- Rp. 69.156.000,-
		g. Jumlah edisi materi Tabloid yang tersusun	12 edisi 12 edisi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: 1.Tabloid Sumut Membangun	Rp. 546.580.000
		e. Frekuensi pelaksanaan Harmnoni Iman di TVRI	144 kali 48 kali 48 kali 48 kali	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan: 1.Harmoni Iman Islam di TVRI 2.Harmoni Iman Kristen Protestan/Khatolik di TVRI 3. Harmoni Iman Kristen Budha/Hindu di TVRI	Rp.185.520.000 Rp.185.520.000 Rp.185.520.000
3	Terwujudnya kerjasama dengan Asosisasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk membuka Blank Spot penyebaran Surat Kabar Lokal diwilayah non komersil	a. Jumlah kerjasama yang terbentuk dengan kelembagaan Kominfo; Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar Lokal : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dalam penyebaran informasi.	6 asosiasi 1 kali, 80 peserta	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga Kegiatan : 1.Workshop Pendidikan Pemerintah bagi Wartawan	Rp.34.071.400,-
		b. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan Infokom/Humas Pemprov	19 kali 1 kali, 34 peserta	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga Kegiatan : 1.Peningkatan <i>Capacity Building</i> untuk peningkatan	Rp.22.240.000,-

			1 kali 1 kali 2 kali	Juru Foto dan Juru Kamera di lingkungan Humas dalam rangka penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pertemuan Infokom / Humas Pemprov 3. Jumpa Pers 4. Temu Konsultasi Bakohumas	Rp.42.157.000,- Rp.104.604.000,- Rp.62.494.000,-
		c. Frekuensi Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov.	1 kali 1 kali, 50 peserta	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga Kegiatan : 1. Lomba karya tulis/lomba foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov	Rp.151.675.000
		d. Jumlah Eksaminasi Informasi dan Kajian Issue Publik melalui media.	12 eksaminasi 12 eksaminasi	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga Kegiatan : 1. Eksaminasi Informasi dan Penyiaran informasi Mingguan isntansi melalui media informasi	Rp. 60.119.000,-
4	Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel)	a. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan mitra kerja Postel (asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya)	25 kali 12 kali 12 kali 1 kali	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi Kegiatan : 1. Rapat evaluasi rutin pos dan telekomunikasi 2. Rapat koordiasi dengan mitra kerja media massa postel, asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya 3. Rapat koordinasi dengan kab/kota	Rp.23.160.150 Rp. 23.263.000 Rp.37.785.000
		b. Jumlah Kab/Kota yang sudah terlayani Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)	33 kab/kota 33 kab/kota	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi Kegiatan : Operasional M-PLIK ke-33 kab/kota	Rp. 346.091.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dapat dikuantifikasi dan diukur.

Indikator Kinerja Utama disusun untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik dan memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta berfungsi untuk memperjelas apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait dan membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja. Merujuk pada Peraturan di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya kerjasama dengan Badan Diklat Provsu dan Badan Diklat Kemenkominfo RI untuk ketersediaan diklat formal dan dan diklat teknis badai SDM/PNS bidang Kominfo	a. Jumlah SDM yang dibutuhkan dari bidang Kominfo
		b. persentase kebutuhan penyelenggaraan dilakt tentang komunikasi dan informatika untuk mendukung kinerja SKPD
		c. Tingkat persentase kerjasama dengan Badan Diklat Provsu dan Badan Diklat Kemenkominfo RI
		d. Frekuensi penyelenggaraan Diklat pertahun yang didukung oleh ketersediaan anggaran
		e. Jumlah kebijakan yang mendukung penyelenggaraan diklat tentang komunikasi dan informatika
2	Terbukanya jaringan informasi dan forum komunikasi media tradisional di 33 kab/kota se-Sumatera Utara	a. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah terakses informasi
		b. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang masih dalam kategori blank spot informasi
		c. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara - Jumlah ketersediaan dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara
		d. Frekuensi lomba, pementasan, pagelaran, pameran dan diseminasi informasi di kab/kota
		e. Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi
		f. Frekuensi pelaksanaan Harmnoni Iman di TVRI
3	Terwujudnya kerjasama dengan Asosisasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk membuka Blank Spot penyebaran Surat Kabar Lokal diwilayah non komersil	a. Jumlah kerjasama yang terbentuk dengan kelembagaan Kominfo; Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar Lokal : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dalam penyebaran informasi.
		b. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan Infokom/Humas Pemprov
		c. Frekuensi Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov.
		d. Jumlah Eksaminasi Informasi dan Kajian Issue Publik melalui media.
4	Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel)	a. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan mitra kerja Postel (asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya)
		b. Jumlah Kab/Kota yang sudah terlayani Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)
5	Terciptanya pelayanan perizinan di bidang komunikasi dan informatika	a. Persentase tingkat pelayanan perizinan di bidang kominfo
		b. Jumlah izin yang diterbitkan
		c. Jumlah usul perizinan

B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai capaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 5 sasaran strategis. Namun dari kelima sasaran strategis tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 hanya memprioritaskan 3 sasaran strategis saja yang bersifat substansial.

Tabel 4
Pengukuran Kinerja 2012 berdasarkan IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terbukanya jaringan informasi dan forum komunikasi media tradisional di 33 kab/kota se-Sumatera Utara	a. Jumlah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang sudah terakses informasi	4 kali, 4 di kab/kota	4 kali, 4 di kab/kota	100 %
		b. Jumlah Kab/Kota di Provsu yang masih dalam kategori blank spot informasi	1 kali, 33 kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	100 %
		h. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara - Jumlah ketersediaan dan prasarana (media) informasi di kab/kota se-Sumatera Utara	1 kali	1 kali	100 %
		i. Frekuensi lomba, pementasan, pagelaran, pameran dan diseminasi informasi di kab/kota	5 kali	5 kali	100 %
		j. Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi	36 kali	44 kali	122,2 %
		k. Frekuensi pelaksanaan Harmnoni Iman di TVRI	144 kali	140 kali	97,2 %
2	Terwujudnya kerjasama dengan Asosisasi Kewartawanan dan	e. Jumlah kerjasama yang terbentuk dengan kelembagaan Kominfo; Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar	1 kali, 80 peserta	1 kali, 50 peserta	100 %

	Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) untuk membuka Blank Spot penyebaran Surat Kabar Lokal diwilayah non komersil	Lokal : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar) dalam penyebaran informasi.			
		f. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan Infokom/Humas Pemprov	19 kali	19 kali	100 %
		g. Frekuensi Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov.	1 kali	1 kali	100 %
		h. Jumlah Eksaminasi Informasi dan Diseminasi Informasi melalui media.	12 kali	12 kali	100 %
3	Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel)	a. Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan mitra kerja Postel (asosiasi, provider dan organisasi radio lainnya)	25 kali	25 kali	100 %
		f. Jumlah Kab/Kota yang sudah terlayani Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK)	33 kab/kota	33 kab/kota	100 %

Dari tabel pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012 secara umum dikatakan tercapai sesuai target RPJMD. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang realisasi capaian kinerjanya melampaui target yang ditetapkan, seperti pada Frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi, Frekwensi pelaksanaan pertemuan / rapat kordinasi dengan Infokom/Humas Pemprov.

Pada indikator kinerja frekuensi dialog interaktif di radio dan televisi realisasi capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan karena memang ada penambahan jumlah frekuensi kegiatan dialog interaktif di televisi dan radio pada perubahan APBD tahun 2012 dari 36 kali menjadi 44 kali (122 %). Hal ini disebabkan makin tingginya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan dialog interaktif tersebut bersama Pemerintah Provinsi Sumatera seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di sisi lain, pencapaian indikator kinerja juga ditentukan oleh sejauhmana program atau kegiatan-kegiatan strategis itu dilaksanakan secara tepat, terarah dan berdaya guna. Berikut akan dipaparkan pengukuran kinerja berdasarkan program dan kegiatan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012.

Tabel 5
Pengukuran Kinerja berdasarkan Program/kegiatan

No	Program / kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
	Kegiatan :			
	1. Sosialisasi tentang Pemberdayaan KIM di Kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	100 %
	2. Pekan Raya Sumatera Utara	1 kali	1 kali	100 %
	3. Lomba Kelompok Informasi se Sumatera Utara	1 kali, 33 kab/kota	1 kali, 33 kab/kota	100 %
	4. Pameran Filateli	1 kali	direvisi	-
	5. Lomba Pementasan Tradisional di Kab/kota	1 kali di 25 Kab/kota	1 kali di 25 Kab/kota	100 %
	6. Dialog Interaktif di Televisi	18 kali	22 kali	122 %
	7. Dialog Interaktif di Radio	18 kali	22 kali	122 %
	8. Tabloid Sumut Membangun	12 edisi	direvisi	-
	9. Harmoni Iman Islam di TVRI	48 kali	47 kali	97,9%
	10. Harmoni Iman Kristen, Protestan /Katolik di TVRI	48 kali	46 kali	95,8%
	11. Harmoni Iman Budha/Hindu di TVRI	48 kali	47 kali	97,9%
12. Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di Kab/Kota	2 kali	2 kali	100 %	
2	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga			
	Kegiatan:			
	1. Workshoop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan	1 kali, 80 peserta	1 kali, 50 peserta	100 %
	2. Peningkatan <i>Capacity Building</i> untuk peningkatan Juru Foto dan Juru Kamera di lingkungan Humas dalam rangka penerapan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 kali, 34 peserta	1 kali, 34 peserta	100 %
	3. Pertemuan Infokom / Humas Pemprov	1 kali	1 kali	100 %
	4. Jumpa Pers	24 kali	28 kali	116,7%
	5. Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov	1 kali, 50 peserta	1 kali, 50 peserta	100 %
	6. Temu Konsultasi Bakohumas	2 kali	2 kali	100 %
7. Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi melalui Media Informasi	12 kali	12 kali	100 %	
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi			

Kegiatan :				
1. Rapat Evaluasi Rutin Pos dan Telekomunikasi	12 kali	12 kali	100 %	
2. Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Media Massa Postel, Asosiasi, Provider dan Organisasi Radio Lainnya	12 kali	12 kali	100 %	
3. Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota	1 kali	1 kali	100 %	
4. Operasional M-PLIK ke 33 kab/Kota	33 kab/kota	33 kab/kota	100 %	

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2012 secara umum dapat dikategorikan terlaksana dengan baik. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan ataupun tidak terlaksana. Adapun kegiatan – kegiatan dimaksud adalah :

1. Pameran Filateli

Kegiatan Pameran Filateli tidak terlaksana karena tingginya harga prangko dan permasalahan teknis lainnya. Kendatipun kegiatan Pameran Filateli tidak terlaksana, tetapi kegiatan tersebut direvisi dengan kegiatan yang lebih adaktif dan tepat, seperti Seminar Nasional Komunikasi Humanis Menghindari Konflik Menuju Sumut Kondusif.

2. Penerbitan Tabloid Sumut Membangun

Kegiatan Penerbitan Tabloid Sumut Membangun tidak terlaksana karena pada waktu bersamaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara juga menerbitkan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut. Penerbitan Buku Respon ini bertujuan untuk menginventarisir pemikiran, ide, gagasan ataupun respon para tokoh Sumatera Utara dari berbagai bidang kajian keilmuan sebagai referensi dalam membangun Sumatera Utara yang lebih baik ke depan.

Selanjutnya, ada beberapa kegiatan yang direvisi dalam Perubahan APBD tahun 2012 di antaranya :

1. Seminar Nasional Komunikasi Humanis Menghindari Konflik Menuju Sumut Kondusif dengan target 1 kali dan dukungan dana Rp. 227.500.000,-

2. Dialog interaktif di televisi mengalami peningkatan jumlah frekuensi kegiatan dari 18 kali menjadi 22 kali.
3. Dialog interaktif di radio juga mengalami peningkatan jumlah frekuensi kegiatan dari 18 kali menjadi 22 kali.
4. Jumpa Pers juga mengalami hal yang sama, yakni adanya peningkatan jumlah frekuensi kegiatan dari 24 kali menjadi 28 kali.
5. Pertemuan Humas kab/kota dengan Jurnalis Daerah dengan target 1 kali dan dukungan dana Rp. 60.520.000,-

Di samping itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 terdapat beberapa kegiatan yang menjadi kegiatan pendukung. Berikut akan dipaparkan kegiatan-kegiatan pendukung beserta pagu anggaran dan realisasinya.

Tabel 6
Kegiatan-kegiatan Pendukung

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	%	
1	3	4	5	6	7	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1	Sosialisasi dan Diseminasi informasi pra pilkada Gubsu/Wagubsu di Kab/Kota tahun 2013	Rp 129.055.000	Rp 125.212.500	97.02 %
		2	Pertemuan komunikasi dan informasi antara Puspida Plus se-Sumatera Utara dalam rangka pra Pilkada Gubsu / Wagubsu tahun 2013	Rp 86.343.000	Rp 78.243.500	90.62 %
		4	Sosialisasi Pilgubsu melalui media cetak	Rp 106.241.000	Rp 106.001.000	99.77 %
		5	Sosialisasi Pilgubsu melalui media outdoor	Rp 126.821.000	Rp 125.621.000	99.05 %
		6	Talkshow dalam rangka komunikasi dan informasi prapilkada Gubsu / Wagubsu melalui Televisi dan Radio	Rp 206.345.000	Rp 203.845.000	98.79 %
		7	Iklan Layanan Masyarakat	Rp 1.139.860.000	Rp 1.131.666.000	99.28 %
		8	Sosialisasi / Publikasi melalui media luar ruang	Rp 2.218.170.000	Rp 2.195.812.500	98.99 %

		9	Seminar Nasional komunikasi humanis menghindari konflik menuju Sumut kondusif	Rp 227.500.000	Rp 204.865.000	90.05 %
		10	Dialog Pembangunan di Televisi	Rp 99.505.000	Rp 99.505.000	100 %
		11	Pemprovsu Menjawab di TVRI	Rp 76.167.000	Rp 62.957.500	82.66 %
		12	Talkshow Sumut Membangun di Radio	Rp 206.345.000	Rp 202.345.000	98.06 %
		13	Talkshow Gubsu mendengar di Radio	Rp 206.345.000	Rp 203.345.000	98.55 %
		14	Talkshow Kaledoskop Akhir Tahun di Radio	Rp 206.345.000	Rp 199.970.000	96.91 %
		15	Talkshow Program Prioritas APBD TA. 2012 Provsu	Rp 206.345.000	Rp 128.145.000	62.10 %
		16	Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya	Rp 206.345.000	Rp 203.845.000	98.79 %
		17	Pemprovsu Menjawab di RRI	Rp 168.550.000	Rp 168.070.000	99.72 %
		18	Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut	Rp 138.765.000	Rp 138.665.000	99.93 %
		19	Pertemuan Humas Kab/Kota dengan Jurnalis daerah	Rp 60.520.000	Rp 59.070.000	97.60 %
		20	Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Rp. 147.600.000	Rp. 147.600.000	100 %
2	Program Peningkatan Kualitas pos dan telekomunikasi	21	Sosialisasi Perundang-Undangan Pos dan Telekomunikasi	Rp. 79.275.000	Rp. 71.505.000	90.20 %
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	22	Sosialisasi Perundang-undangan pos dan telekomunikasi	Rp 79.275.000	Rp 71.505.000	90.20 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara semuanya sebesar Rp. 35.242.565.220,-(Belanja Tidak Langsung Rp. 22.437.767.513,- dan Belanja Langsung Rp. 12.804.797.707,-).

Khusus untuk ketiga program strategis, anggaran yang dibutuhkan berjumlah 8.400.301.050,- dengan realisasi anggaran Rp. 8.163.523.995,- (96.49 %) yang dapat dirinci sebagai berikut:

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa, anggaran sebesar Rp 7.151.771.000 dengan realisasi Rp 6.955.942.000 (94.48 %).
3. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga, anggaran sebesar Rp 739.955.900 dengan realisasi Rp 738.018.400 (98.97%).
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi, anggaran Rp 508.574.150,- dengan realisasi Rp 469.563.595 (96.02 %).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serapan keuangan masing-masing Program dan kegiatan yang mengacu pada pencapaian sasaran strategis, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Realisasi Anggaran tahun 2012

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Terbukanya jaringan Informasi dan Forum Komunikasi Media Tradisional di 33 Kabupten/Kota se Sumatera Utara melalui Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Sosialisasi dan Diseminasi informasi pra pilkada Gubsu/Wagubsu di Kab/Kota tahun 2013	Rp 129.055.000	Rp 125.212.500	97.02 %
			Pertemuan komunikasi dan informasi antara Puspida Plus se-Sumatera Utara dalam rangka pra Pilkada Gubsu / Wagubsu tahun 2013	Rp 86.343.000	Rp 78.243.500	90.62 %
			Sosialisasi tentang Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kab/Kota	Rp 45.671.000	Rp 45.466.000	99.55 %
			Pekan Raya Sumatera Utara	Rp 67.935.000	Rp 67.935.000	100 %
			Sosialisasi Pilgubsu melalui media cetak	Rp 106.241.000	Rp 106.001.000	99.77 %
			Sosialisasi Pilgubsu melalui media outdoor	Rp 126.821.000	Rp 125.621.000	99.05 %
			Talkshow dalam rangka komunikasi dan informasi prapilkada Gubsu /	Rp 206.345.000	Rp 203.845.000	98.79 %

	Wagubsu melalui Televisi dan Radio			
	Iklan Layanan Masyarakat	Rp 1.139.860.000	Rp 1.131.666.000	99.28 %
	Sosialisasi / Publikasi melalui media luar ruang	Rp 2.218.170.000	Rp 2.195.812.500	98.99 %
	Seminar Nasional komunikasi humanis menghindari konflik menuju Sumut kondusif	Rp 227.500.000	Rp 204.865.000	90.05 %
	Lomba Kelompok Informasi se Sumatera Utara.	Rp 65.725.000	Rp 65.725.000	100 %
	Lomba Pementasan Tradisional di Kab/Ko	Rp 102.185.000	Rp 102.185.000	100 %
	Pementasan Pertunjukan Rakyat Media Tradisional di kab/ko	Rp 230.770.000	Rp 228.610.000	99.06 %
	Pagelaran Pertunjukan Rakyat Tingkat Nasional	Rp. 147.600.000	Rp 146.788.000	99.45 %
	Dialog Interaktif di Televisi	Rp 95.754.000	Rp 95.729.000	99.97 %
	Dialog Pembangunan di Televisi	Rp 99.505.000	Rp 99.505.000	100 %
	Pemprovsu Menjawab di TVRI	Rp 76.167.000	Rp 62.957.500	82.66 %
	Dialog Interaktif di Radio	Rp 84.524.000	Rp 84.524.000	100 %
	Talkshow Sumut Membangun di Radio	Rp 206.345.000	Rp 202.345.000	98.06 %
	Talkshow Gubsu mendengar di Radio	Rp 206.345.000	Rp 203.345.000	98.55 %
	Talkshow Kaledoskop Akhir Tahun di Radio	Rp 206.345.000	Rp 199.970.000	96.91 %
	Talkshow Program Prioritas APBD TA. 2012 Provsu	Rp 206.345.000	Rp 128.145.000	62.10 %
	Talkshow Menyambut Ramadhan dan Hari Raya	Rp 206.345.000	Rp 203.845.000	98.79 %
	Pemprovsu Menjawab di RRI	Rp 168.550.000	Rp 168.070.000	99.72 %

			Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut	Rp 138.765.000	Rp 138.665.000	99.93 %
			Harmoni Iman Islam di TVRI	Rp 185.520.000	Rp 181.430.000	97.80 %
			Harmoni Iman Kristen Protestan/Khatolik di TVRI	Rp 185.520.000	Rp 177.790.000	95.83 %
			Harmoni Iman Budha/Hindu di TVRI	Rp 185.520.000	Rp 181.655.000	97.92 %
2	Terwujudnya kerjasama dengan Asosiasi Kewartawanan dan Penerbitan Surat Kabar : PWI, AJI, Pimpinan Surat Kabar dan SPS (Serikat Penerbit Surat Kabar)	Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga	Desiminasi Informasi dan Forum dialog dengan kab/kota	Rp 100.320.000	Rp 100.295.000	99.98 %
			Workshop Pendidikan Pemerintahan bagi Wartawan	Rp 34.071.400	Rp 34.071.000	100 %
			Peningkatan <i>Capacity Building</i> untuk peningkatan juru foto dan juru kamera di lingkungan Humas dalam rangka penerapan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rp 22.240.000	Rp 22.240.000	100 %
			Pertemuan Infokom / Humas Pemprov	Rp 42.157.000	Rp 42.157.000	100 %
			Jumpa pers	Rp 121.838.000	Rp 121.838.000	100 %
			Temu Konsultasi Bakohumas	Rp 62.494.000	Rp 62.494.000	100 %
			Pertemuan Humas Kab/Kota dengan Jurnalis daerah	Rp 60.520.000	Rp 59.070.000	97.60 %
			Lomba Karya Tulis/Lomba Foto dalam rangka Hari Jadi Pemprov	Rp 168.175.000	Rp 168.175.000	100 %
			Eksaminasi Informasi dan Penyiaran Informasi Mingguan Instansi melalui Media Informasi	Rp 60.119.000	Rp 60.119.000	100 %
			Kajian Issue Publik	Rp 68.021.500	Rp 67.559.400	99.32 %

3	Terwujudnya kerjasama dengan Mitra kerja Pos dan Telekomunikasi (Postel)	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi	Sosialisasi Perundang-undangan pos dan telekomunikasi	Rp 79.275.000	Rp 71.505.000	90.20 %
			Rapat Rutin Pos dan Telekomunikasi	Rp 23.160.150	Rp 23.157.550	99.99 %
			Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja Media Massa Postel, Asosiasi, Provider dan Organisasi Radio Lainnya	Rp 22.263.000	Rp 22.008.500	98.86 %
			Rapat Koordinasi dengan Kab/Kota	Rp 37.785.000	Rp 37.785.000	100 %
			Operasional M-PLIK ke 33 kab/Ko	Rp 346.091.000	Rp 315.107.545	91.05 %
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa				Rp 7.151.771.000	Rp 6.955.942.000	94.48 %
2. Program Penguatan Kelembagaan Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga				Rp 739.955.900	Rp 738.018.400	98.97 %
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pos dan Telekomunikasi				Rp 508.574.150	Rp 469.563.595	96.02 %
Jumlah Anggaran Program Strategis				Rp 8.400.301.050	Rp 8.163.523.995	96.49 %

BAB IV PENUTUP

A. URAIAN KEBERHASILAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara TA. 2012 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada DPA tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada IKU instansi sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 5 sasaran strategis. Namun dari kelima sasaran strategis tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2012 hanya memprioritaskan 3 sasaran strategis saja yang bersifat substansial.

Berdasarkan peraturan diatas maka realisasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2012 secara umum dikatakan tercapai sesuai target RPJMD. Walaupun harus diakui ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena faktor internal maupun eksternal, seperti kegiatan Pameran Filateli dan Penerbitan Tabloid Sumut Membangun. Namun demikian, kegiatan-kegiatan tersebut direvisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih adaktif dan tepat, seperti Penerbitan Buku Respon dan Gagasan para Tokoh Sumut, Seminar Nasional Komunikasi Humanis Menghindari Konflik Menuju Sumut Kondusif dan beberapa kegiatan pendukung lainnya.